

STUDI PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Oleh
Sumiati
NIM. 2105040035

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap stabilitas negara dan menghambat perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai permasalahan hukum, khususnya terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura. Permasalahan ini terlihat dari disparitas jumlah kasus Indonesia 2.771 dan Singapura 1.114 kasus periode 2020-2024 yang menimbulkan perbandingan hukum akibat lemahnya penanganan dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura, dengan fokus pada aspek regulasi, struktur kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam konstruksi hukum dan model kelembagaan di kedua negara. Di Indonesia, penegakan hukum menggunakan sistem *multi-agency* yang sering menghadapi kendala koordinasi dan ego sektoral. Selain itu, regulasi di Indonesia menitikberatkan pada delik materiil yang mensyaratkan pembuktian unsur kerugian keuangan negara, sehingga proses hukum sering terhambat oleh kompleksitas audit. Sebaliknya, Singapura menerapkan sistem *single-agency* yang terpusat pada *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) di bawah otoritas Perdana Menteri, yang menjamin jalur penanganan perkara lebih efisien dan independen. Regulasi Singapura melalui *Prevention of Corruption Act* (PCA) tidak mensyaratkan kerugian negara, melainkan berfokus pada niat koruptif dan penerapan pembalikan beban pembuktian yang progresif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum di Indonesia memerlukan reformasi pada mekanisme pembuktian, harmonisasi kewenangan antarlembaga, serta peningkatan budaya integritas aparat dan masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Perbandingan Hukum, Indonesia, Singapura.

COMPARATIVE STUDY OF THE ENFORCEMENT OF CORRUPTION CRIMINAL LAW BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE

By
Sumiati
NIM. 2105040035

Abstract

Corruption constitutes an extraordinary crime with systemic impacts on state stability and impedes the realization of good governance. However, legal challenges persist in implementation, particularly concerning the enforcement of corruption criminal law between Indonesia and Singapore. This issue is evident from the disparity in case numbers, with Indonesia recording 2,771 cases and Singapore 1,114 cases during the 2020-2024 period, prompting legal comparison due to weaknesses in corruption eradication efforts. This research aims to examine the enforcement of corruption criminal law between Indonesia and Singapore, focusing on regulatory aspects and institutional structures. The research employs a normative legal method with comparative law and conceptual approaches. Research data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative descriptive analysis. The findings reveal fundamental differences in legal construction and institutional models between the two countries. In Indonesia, law enforcement utilizes a multi-agency system that frequently encounters coordination obstacles and sectoral ego. Furthermore, Indonesian regulations emphasize material offenses requiring proof of state financial losses, causing legal processes to be frequently hindered by audit complexity. Conversely, Singapore implements a single-agency system centralized under the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) under the Prime Minister's authority, ensuring more efficient and independent case-handling procedures. Singapore's regulations through the Prevention of Corruption Act (PCA) do not require proof of state losses but rather focus on corrupt intent and the application of progressive burden of proof reversal. This research concludes that strengthening law enforcement in Indonesia requires reforms in evidentiary mechanisms, harmonization of inter-agency authority, and enhancement of integrity culture among officials and society.

Keywords: *Corruption, Law Enforcement, Comparative Law, Indonesia, Singapore.*